



Dugaan Korupsi Bansos dan Hibah Rp 14,9 Miliar Masuk Babak Baru

Pansus: Menurut Kemendagri Banyak Indikasi Penyimpangan

miliar. Usai berkonsultasi dengan Kemendagri, pansus akan segera menggelar rapat internal untuk mengambil langkah selanjutnya.

Diketahui, berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Kalbar, akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, bansos dan hibah berupa barang pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas pertanian dan Peternakan dan Dinas Perkebunan Kehutanan dan Pertambangan senilai Rp14.882.750.800 berpotensi disalahgunakan.

Bambang Sridadi.

SUNGAI RAYA-RK. DPRD Kubu Raya telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah tahun anggaran 2013 sebesar Rp 14,9

"Saat ini kami berada di Jakarta dan akan kembali ke Pontianak malam ini (kemarin, red). Kepergian kami bersama anggota pansus lainnya dalam rangka konsultasi dengan Kemendagri terkait Undang-undang No.32 tahun 2012, yaitu mengenai mekanisme penyaluran dana hibah dan bansos," kata Wakil Ketua Pansus, Bambang Sridadi dihubungi via seluler, Rabu (6/8).

Pria yang akrab disapa Benk-benk ini menjelaskan, hasil dari konsultasi tersebut menurut pihak Kemendagri banyak indikasi penyimpangan

ketika dikaitkan dengan UU Nomor 32 tahun 2012. "Ya, menurut pihak Kemendagri indikasi penyimpangan dalam mekanisme penyaluran hibah dan bansos tersebut sangat berpotensi. Maka dari itu, sebagai tindak lanjut kami akan melakukan rapat sesampainya di Pontianak," terang dia.

Pansus, ditegaskan Benk-benk akan mengusut indikasi penyimpangan tersebut dengan selurus-lurusnya. "Sementara ini indikasi penyimpangan yang ada terhadap mekanisme penyaluran hibah dan bansos itu terletak dalam

pedoman penyaluran hibah, tapi perkembangan lebih lanjut setelah rapat internal dilakukan," ujar dia.

Pansus, sambung politisi Partai Demokrat ini akan memanggil ketiga SKPD yang diduga melakukan penyimpangan dalam penyaluran dana hibah dan bansos tersebut. "Dan juga kita akan memanggil ketua tim anggaran eksekutif yaitu Sekda dan Kepala BPKAD Kubu Raya," pungkas Benk-benk.

LAPORAN: ARI SANDY
EDITOR: JULIANUS RATNO

